

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI KECAMATAN LOWOKWARU KOTA
MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik



Oleh:
FIRMIANUS YONANSARIL NAPARAHU
NIM. 2018210032

KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK
PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG
2022

RINGKASAN

Cara mewujudkan keselamatan bersama lewat pengentasan kemiskinan ialah maksud dan tekad nasional. Pemberian dukungan dalam rupa pertolongan berupa Program Keluarga Harapan mewujudkan daya pemerintah memperbaiki urusan ini. Tetapi, saat pelaksanaan program berlimpah ketimpangan yang muncul, rencana program tidak dibagikan dengan terarah sehingga penerapan sumbangan bukan sesuai dengan niat program sendiri bagi anggota. Yang melatarbelakangi motivasi penelitian ini adalah buat menangkap pengembangan kesejahteraan penduduk dengan penerapan Program Keluarga Harapan serta mengetahui variabel yang memimpin pelaksanaan program pada peningkatan keselamatan masyarakat di Kawasan Lowokwaru, Malang. Kualitatif ialah cara yang digunakan, melalui tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi sebagai alat akumulasi datanya. Serta pengkaji sendiri sebagai alat penelitiannya. Penerapan pedoman program warga harapan dalam memajukan kesejahteraan rakyat di Kawasan Lowokwaru, Malang mengikuti penelitian yang digarap, telah benar. Urusan ini tercermin dalam wacana, sumber upaya, disposisi, dan bentuk birokrasi. Mulai sudut komunikasi, penerapan PKH diketahui dengan pertemuan sekali sebulan sama pendamping. Sumber daya, dukungan sarana oleh pemerintah Provinsi dan APBD beserta penyediaan materi P2K2. Disposisi, kesukarelaan dan kewajiban dari fasilitator. Bentuk birokrasi, transparannya SOP serta pembagian otoritasnya.

Keyword: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan dipahami seumpama teladan melingkupi rasa tentram, damai, dan makmur dalam kehidupan bersama tiap bangsa, bagi upaya memenuhi kepentingan individu, anggota, dan rakyat (Sunarti, 2012). Adapun untuk kepentingan bersama pasti tidak asing dari masalah kemiskinan, keduanya terpaut dan saling berpengaruh. Kemiskinan merupakan kepentingan dasar masyarakat melingkupi sandang, pangan, papan, juga kesehatan dan pendidikan akibat ketidakberdayaan warga negara. Yang mengakibatkan, sulitnya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pengentasan kemiskinan ialah maksud dan kehendak negara berkembang, seperti indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Melalui terbentuknya ketentraman bersama, seperti yang diinginkan bakal tumbuh negara aman, tentram, makmur. Cara pemerintah buat mengalahkan masalah ini, yakni dengan pemberian Bansos (Program Keluarga Harapan). Melalui acuan dan progres rakyat miskin, terbentuk masyarakat yang berguna, independen, bahagia dalam mengembangkan taraf hidup penduduk sampai terlepas dari kekurangan, yang merupakan maksud dari bantuannya.

Program Keluarga Harapan yakni program bantuan langsung kepada keluarga miskin dengan memenuhi syarat, buat membantu memajukan sumber akal manusia, termasuk pengetahuan, kesehatan serta keselamatan bersama. Permensos No. 1 Tahun 2018 merupakan dasar hukum Program Keluarga Harapan. Dimulai awal September

2013, Kecamatan Lowkwaru melaksanakan program 'Keluarga Harapan'. Hal ini direncanakan supaya program 'Keluarga Harapan' melahirkan bantuan sosial pemerintah akan keluarga miskin, untuk berkontribusi dalam usaha meningkatkan ketidakmampuan dan ketimpangan sosial. Program ini berbentuk bantuan langsung bersyarat, yang diarahkan buat anggota miskin dan dilaksanakan dengan menyertai perantara sebagai pemantau ketaatan penerima atas persyaratannya.

Namun, masih banyak ketidakseimbangan antara aspirasi dan kenyataannya pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Program yang dibagikan tidak benar sarasannya dan pemakaian dana sama penerima tidak sesuai dengan maksud program itu sendiri. Menurut BPK, ditemukan tiga indikasi bantuan sosial sebanyak Rp. 6,93 triliun mencakup PKH, BPNT, dan BST yang tidak tepat sarasannya. Urusan ini dapat terlihat pada Tahun 2021 dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (Sindonews.com, 2021)

Maka, peneliti membuat penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lowokwaru, Malang". Hal ini disebabkan kesadaran masyarakat yang minim terkait kesehatan dan pendidikan serta taraf ekonomi penerimanya yang masih rendah, sehingga keperluan akan finansialnya belum tercipta. Upaya memajukan dan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakat belum sepenuhnya tercipta sebagaimana yang ditujuangkan.

Tujuan utama program ini ialah membantu meningkatkan kualitas hidup mereka dengan mengembangkan akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan kedamaian sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memutuskan lingkaran kemiskinan di masyarakat, juga

dapat menyalurkan bantuan tepat sasaran kepada keluarga yang membutuhkan, serta pemakaian dana yang tepat oleh penerima sebagaimana mestinya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Kebijakan PKH Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang?
2. Apa Saja Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kebijakan PKH Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Kebijakan PKH Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
2. Untuk Mengidentifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kebijakan PKH Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan pengetahuan kepada semuanya, khususnya di bidang Administrasi Publik dan untuk mengembangkan kemampuan penulis untuk mengatasi masalah sosial yang muncul di masyarakat.

2. Manfaat Praktik

Dimaksudkan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya KPM dan juga memperoleh tambahan pengalaman langsung peneliti dalam pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Handani, Deni., Sari, M., & Lia, Ira. *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bungo*, vol 4, no 1 Agustus 2019.
- Manzilati, Asfi. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, Dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mawarni, Kahfi Septian. *Pengaruh Implementasi Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Ciomas Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis*, vol 6, no 3 September 2019.
- Muh, Tahdin. *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Pendidikan Dan Kesehatan* (studi kasus DesaJati Sawit Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu), IAIN Syeikh Nur Jati Cirebon,9.
- Purwanto, Slamet Agus. *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Memutus Rantai Kemiskinan* (Kajian di Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto), vol 16, no 2 Tahun 2013.
- Sasmito, Cahyo. *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu*, vol 3, no 2 Mei 2019.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligencia Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2017. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Revika Aditama.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Anlisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creatif.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No 31 Tahun 2007
Tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan

Internet

<https://nasional.sindonews.com/newsread/788075/15bpk-temukan-rp69-triliun-dana-bansos-tak-tepat-sasaran-mensos-risma-itu-biasa-16542831178> diakses pada tanggal 16 Juni 2022.